

SKRIPSI

**PEMANFAATAN HUTAN UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
PADA WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

*Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:



Pembimbing:

Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn.

Amelia Zulfitri, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026**

No. Reg: 13/PK VIII/III/2026

	No. Alumni Universitas		Naya Putri Fadyah		No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir	: Padang/ 30 April 2004	f. Tanggal Lulus	: 9 Juni 2026	
	b. Nama Orangtua	: Yufendri & Syofiarti	g. Predikat Lulus	: Dengan Pujian	
	c. Fakultas	: Hukum	h. Lama Studi	: 3 Tahun 10 Bulan	
	d. PK	: Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam	i. IPK	: 3,95	
	e. No. BP	: 2210112027	j. Alamat	: Jl. Palinggam No. 49, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang.	

PEMANFAATAN HUTAN UNTUK KEGIATAN BERUSAHA PADA WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

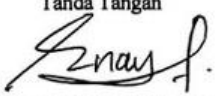
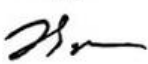
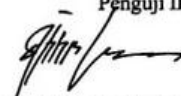
(Naya Putri Fadyah, 2210112027, Program Kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 109 Halaman, 2026)

ABSTRAK

Rezim kehutanan melalui mekanisme Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) memberikan ruang bagi pemanfaatan hutan yang berorientasi pada investasi dan kemudahan berusaha, sementara Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menekankan perlindungan, konservasi, dan keberlanjutan ekosistem. Perbedaan tersebut menimbulkan dualisme norma yang berdampak pada ketidakpastian hukum, khususnya dalam penerapan pemanfaatan hutan di wilayah pulau-pulau kecil. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi (1) Bagaimana pengaturan pemanfaatan hutan untuk kegiatan berusaha pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil? (2) Bagaimana bentuk pemanfaatan hutan yang ideal pada wilayah tersebut?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat deskriptif, serta pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakharmonisan norma antara pengaturan dalam rezim kehutanan dan rezim pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menimbulkan antinomi norma, sehingga diperlukan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dengan menempatkan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai pengaturan khusus yang harus diprioritaskan. Selain itu, bentuk pemanfaatan hutan yang ideal pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus didasarkan pada pendekatan berkelanjutan yang mengutamakan konservasi, jasa lingkungan, perhutanan sosial, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dengan tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian, keterpaduan, perlindungan masyarakat adat, dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Pemanfaatan Hutan, PBPH, Pulau-Pulau Kecil, Dualisme Norma.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 09 Juni 2026

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
		
Naya Putri Fadyah	Darnis, S.H., M.H.	Dr. Titin Fatimah, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara: **Hendria Fithrina, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	No. University Alumni	Naya Putri Fadyah	No. Faculty Alumni
	a. Place/Date of Birth : Padang/ April 30 th 2004 b. Parent's Name : Yufendri & Syofianti c. Faculty : Law d. Concentration : Agrarian Law and Natural Resources e. Student ID : 2210112027	f. Graduation Date : June 09 th 2026 g. Pass Predicate : Cumlaude h. Length of Study : 3 years 10 Months i. GPA : 3,95 j. Address : Palinggam No. 49, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang	

FOREST UTILIZATION FOR BUSINESS ACTIVITIES IN COASTAL AREAS AND SMALL ISLANDS

Naya Putri Fadyah, 2210112027, Agrarian Law and Natural Resources, Faculty of Law, Andalas University, 109 pages, 2026.

ABSTRACT

The forestry regime, through the mechanism of Forest Utilization Business Approval (*Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan / PBPH*), provides opportunities for forest utilization that is oriented toward investment and ease of doing business. In contrast, the Law on Coastal Areas and Small Islands Management emphasizes the protection, conservation, and sustainability of ecosystems. This difference creates a dualism of norms that results in legal uncertainty, particularly in the implementation of forest utilization on small islands. The research questions addressed in this study are: (1) How is forest utilization for business activities regulated in coastal areas and small islands? and (2) What is the ideal form of forest utilization in these areas? This study employs a normative juridical legal research method with a descriptive approach and utilizes a statutory approach. The data used consist of secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively through library research. The findings indicate that there is a lack of harmony between the regulations under the forestry regime and those governing coastal areas and small islands management, resulting in a conflict of norms (*antinomy of norms*). Therefore, the principle of *lex specialis derogat legi generali* should be applied by positioning the Law on Coastal Areas and Small Islands Management as the special regulation that must take precedence. Furthermore, the ideal form of forest utilization in coastal areas and small islands should be based on a sustainable approach that prioritizes conservation, environmental services, social forestry, and the utilization of non-timber forest products, while adhering to the principles of precaution, integration, protection of indigenous peoples, and community participation.

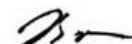
Keywords: Forest Utilization, PBPH, Small Islands, Normative dualism.

This minor thesis has defended in front of the examiner team at June 09th 2026.

Signature	Examiner I	Examiner II
		
Naya Putri Fadyah	Darnis, S.H., M.H.	Dr. Titin Fatimah, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of Department of Administrative Law: **Hendria Fithrina, S.H., M.H.**



Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: